

ABSTRAK

Pada dasarnya Narkotika di Indonesia, apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya jika penggunaannya sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya bisa digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan melarang penggunaan atau peredaran Narkotika tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di Polres Semarang dan untuk mengetahui tentang kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, perundang-undangan dan wawancara. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada di Polres Semarang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Semarang diawali dengan adanya laporan dari seseorang telah terjadinya tindak pidana narkotika. Tindakan penyidik diawali dengan melakukan pemanggilan saksi, pengangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, meminta keterangan saksi dan tersangka serta mengumpulkan barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, apabila sudah dinyatakan lengkap atau P.21 penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Dalam hal penyidikan terdapat kendala-kendala antara lain personil, masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika, kurangnya partisipasi masyarakat akan suatu tindak pidana narkotika, dan sarana prasarana. Dalam hal mengatasi kendala-kendala Polres Semarang telah mengupayakan melakukan pelatihan penyidikan, melakukan sosialisasi narkotika, melakukan pengusulan untuk biaya sarana dan prasarana.

Kata Kunci :Penyidikan, tindak pidana, Narkotika

ABSTRACT

Basically Narcotics in Indonesia, if viewed from the juridical aspect is the validity of its existence if the user is in accordance with the rules that apply in the Act governing Narcotics, where Narcotics can only be used for health services, science, technology, and prohibiting the use or circulation of Narcotics without permission. This study aims to find out about the investigation process of narcotics crimes at the Semarang Police Station and to find out about the obstacles faced and solutions in law enforcement efforts against narcotics crimes. This study uses a sociological juridical approach, the data source uses primary data and secondary data, namely data obtained from literature, legislation and interviews. Data analysis using descriptive analytical method, namely explaining, describing and describing in accordance with the problems that exist in Semarang Police Station. Based on the results of the study, it was found that the investigation process of narcotics crimes in Semarang District Police began with the existence of reports from someone after the occurrence of narcotics crime. The investigator's actions are initiated by summoning witnesses, arrest, detention, search, confiscation of evidence, requesting testimony from witnesses and suspects and collecting evidence, completion and submission of case files, if it has been declared complete or P.21 investigators submit responsibility for the suspect and evidence to the public prosecutor. In the case of investigations there are obstacles including personnel, the public is not aware of the characteristics of narcotics, lack of community participation in a narcotics crime, and infrastructure. In terms of overcoming the constraints of the Semarang District Police, they have attempted to conduct investigative training, conduct narcotics socialization, make proposals for the cost of facilities and infrastructure.

Key Words : Investigations, criminal act, Narcotics